



Kemendikdasmen



# LAPORAN KINERJA BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BBGTK Provinsi Jawa Barat berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

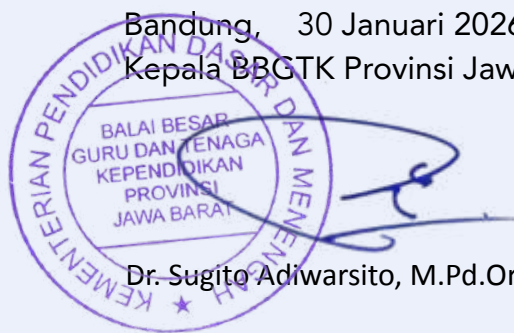
Penyusunan Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Di dalam Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tersaji informasi mengenai capaian kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat. Harapan kami, Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Bandung, 30 Januari 2026

Kepala BBGTK Provinsi Jawa Barat



Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.Or.

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi dan percepatan pencapaian Sasaran Strategis. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra BBGTK Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan;
2. Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Melalui perumusan tujuan ini, BBGTK Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dikelola dapat memberikan hasil (outcome) yang optimal, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, BBGTK Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan program dan kegiatan secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian indikator tujuan strategis secara umum menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja satker dalam mendukung sasaran strategis Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru.

Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan berbasis kinerja yang semakin berkualitas, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, satker telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Capaian Tahun 2025 menjadi landasan bagi peningkatan kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat pada tahun berikutnya



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur melalui 3 indikator kinerja tujuan, yaitu

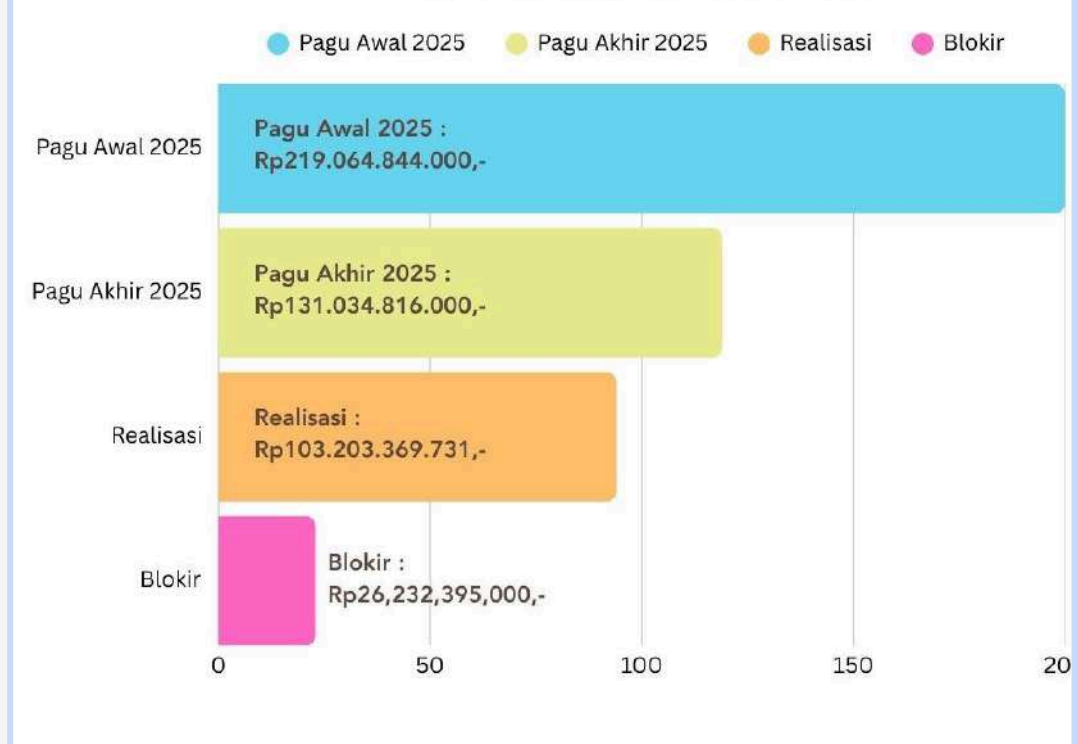
- IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
- IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik
- IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A

Sepanjang tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat telah mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan sumber daya untuk mendukung prioritas nasional, prioritas Kementerian, serta agenda transformasi pendidikan dasar dan menengah.

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Dari total 3 (tiga) indikator kinerja, semua indikator kinerja berhasil mencapai atau melampaui target. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Berikut ringkasan capaian kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 :



## Capaian Anggaran Tahun 2025



**Capaian >100% = 3 IKK**

### Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan



Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

### Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat

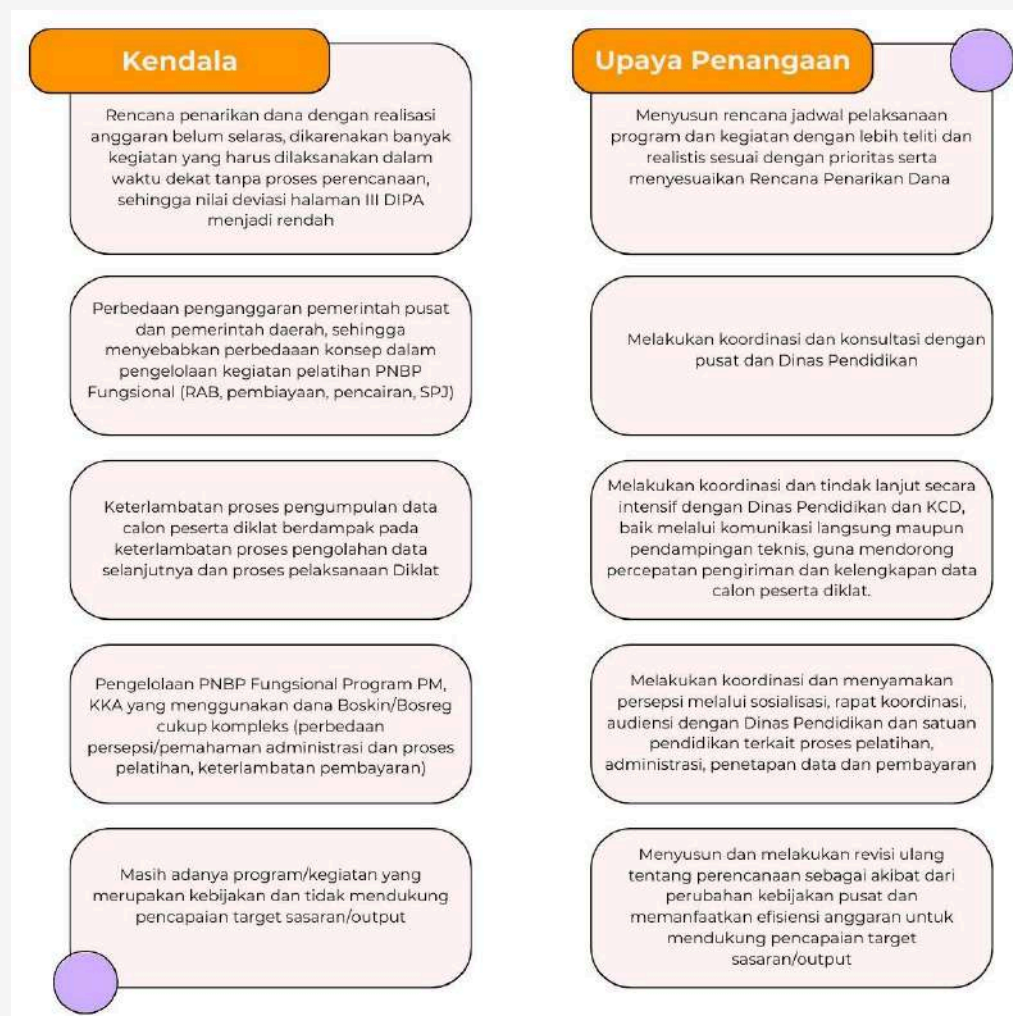


### Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat



Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2025 mengalami penurunan, hal tersebut seiring dengan adanya kebijakan efisiensi dan blokir dari pusat.

Selama tahun 2025 terdapat permasalahan/kendala koordinasi, administrasi, dan teknis dalam upaya pencapaian target, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala tersebut, antara lain:



# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi.....	7
Daftar Tabel.....	8
Daftar Gambar.....	9
BAB I.....	11
Pendahuluan.....	11
A. Gambaran Umum.....	11
1. Data Pegawai.....	12
B. Dasar Hukum.....	13
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	14
Tugas.....	14
Fungsi.....	14
Struktur Organisasi.....	15
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan.....	16
E. Peran Strategis.....	17
BAB II.....	19
Perencanaan Kinerja.....	19
A. Rencana Strategis.....	19
B. Program Prioritas 2025.....	21
C. Rencana Kerja dan Anggaran.....	23
D. Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III.....	29
Akuntabilitas Kinerja.....	29
A. Akuntabilitas Kinerja.....	29
B. Realisasi Anggaran.....	46
1. Capaian Anggaran.....	46
2. Efisiensi Anggaran.....	49
C. Kinerja Lain-lain.....	50
1. Reformasi Birokrasi.....	50
2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung.....	51
3. Inovasi.....	53
4. Penghargaan.....	57
5. Program Crosscutting/Collaborative.....	63
BAB IV.....	66
Penutup.....	66
Lampiran.....	69
1. Perjanjian Kinerja Awal.....	69
2. Perjanjian Kinerja Revisi.....	71
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	73
4. Reviu Laporan Kinerja 2025.....	74

# Daftar Tabel

Tabel 1. Matriks Kinerja.....	21
Tabel 2. Program prioritas yang dilakukan oleh BBGTK Jawa Barat.....	23
Tabel 3. Rencana Kerja BBGTK Jawa Barat Tahun 2025.....	23
Tabel 4. Rincian Sasaran Kinerja Tahun 2025.....	24
Tabel 5. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBGTK Jawa Barat Tahun 2025-2029.....	25
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025.....	26
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 8. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.....	32
Tabel 9. Rekapitulasi Capaian Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja.....	35
Tabel 10. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik.....	39
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik tahun 2025 dengan target Akhir Renstra 2025-2029.....	41
Tabel 12. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A.....	44
Tabel 13. Perbandingan Capaian atas IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A dengan target akhir Renstra 2025-2029.....	44
Tabel 14. Realisasi Program/Agenda Prioritas.....	46
Tabel 15. Realisasi anggaran per program Tahun 2025 BBGTK Jawa Barat.....	48
Tabel 16. Realisasi anggaran per program Tahun 2025 BBGTK Jawa Barat.....	49

# Daftar Gambar

Gambar 1. Wilayah Kerja BBGTK Jawa Barat.....	11
Gambar 2. Data Pegawai BBGTK Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Pangkat/Golongan...	12
Gambar 3. Data Pegawai BBGTK Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jabatan.....	12
Gambar 4. Struktur Organisasi BBGTK Jawa Barat.....	15
Gambar 5. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Pelatihan Fasda BK.....	33
Gambar 6. Desain Pengembangan Kompetensi Guru, KS, PS pada Implementasi Pembelajaran Mendalam.....	34
Gambar 7. Sejarah Anggaran BBGTK Jawa Barat Tahun 2025.....	46
Gambar 8. Capaian Anggaran Tahun 2025.....	48
Gambar 9. Informasi Capaian Kerja Lainnya yang Mendukung Ketercapaian Indikator Kinerja.....	51
Gambar 10. Program Inovasi.....	52
Gambar 11. Ringkasan Kinerja.....	65
Gambar 12. Capaian Anggaran Tahun 2025.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN



# BAB I

## Pendahuluan

### A. Gambaran Umum

Secara umum, kondisi BBGTK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 menunjukkan kesiapan kelembagaan, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang lebih berkualitas. Hal ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Struktur organisasi BBGTK Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur pimpinan, unit teknis, serta bagian-bagian pendukung yang berfungsi memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh unsur bekerja secara sinergis dalam rangka mencapai sasaran strategis Renstra 2025–2029, khususnya terkait peningkatan mutu layanan pendidikan, efektivitas tata kelola, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025, terdiri dari aparatur dengan kompetensi beragam, baik fungsional maupun struktural. Upaya peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan manajemen kinerja berbasis hasil. Budaya kerja berintegritas, adaptif, dan kolaboratif terus ditumbuhkan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Tematik dan penguatan nilai ASN BerAKHLAK.

BBGTK Provinsi Jawa Barat merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. BBGTK Provinsi Jawa Barat pertama kali dibentuk tahun 2025 sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 24 April 2025. Sejak 11 September 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Dr. Sugito Adiarsito, M.Pd.Or. Jumlah SDM sebanyak 326 Orang. BBGTK Provinsi Jawa Barat mempunyai wilayah kerja Provinsi Jawa Barat.

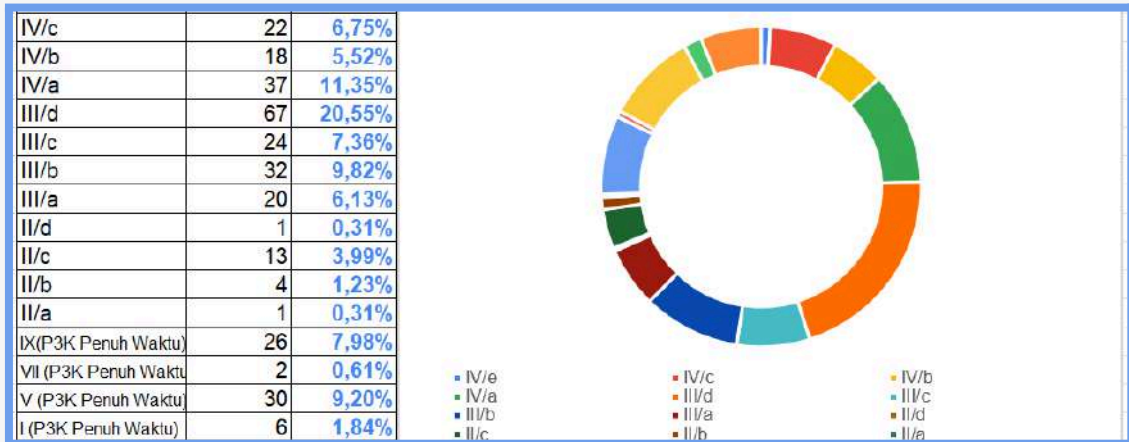
Gambar 1. Wilayah Kerja BBGTK Jawa Barat



1. Data Pegawai

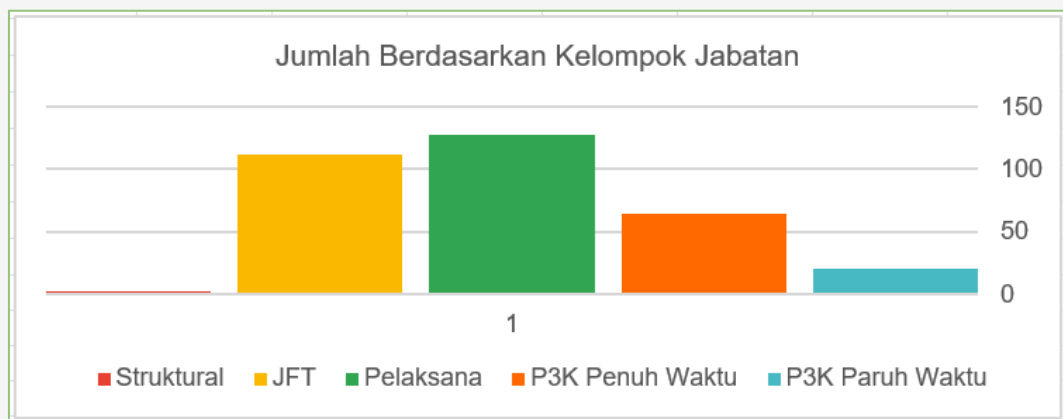
Gambaran jumlah pegawai di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Data Pegawai BBGTK Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Pangkat/Golongan



Gambar 3. Data Pegawai BBGTK Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jabatan

KELOMPOK JABATAN		
Struktural	2	0,61%
JFT	112	34,36%
Pelaksana	128	39,26%
P3K Penuh Waktu	64	19,63%
P3K Paruh Waktu	20	6,13%
<b>Total</b>	<b>326</b>	



KELOMPOK JFT		
Analisis Kebijakan	1	0,89%
Widyaiswara	76	67,86%
PTP	29	25,89%
APK APBN	3	2,68%
Pustakawan	1	0,89%
Arsiparis	1	0,89%
Perawat	1	0,89%
<b>Total</b>	<b>112</b>	



## B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, BBGTK Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Nomor 38/B/HK.03.01/2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Tahun 2025-2029;
15. Renstra BBGTK Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBGP Jawa Barat Nomor: SP DIPA-023.16.2.690591/2024 tanggal 24 November 2024;
17. Program Kerja dan Anggaran BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

### C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

#### Tugas

BBGTK Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas sesuai mandat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No.5 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, BBGTK Provinsi Jawa Barat memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

#### Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BBGTK Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

2. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
4. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
5. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
6. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi.

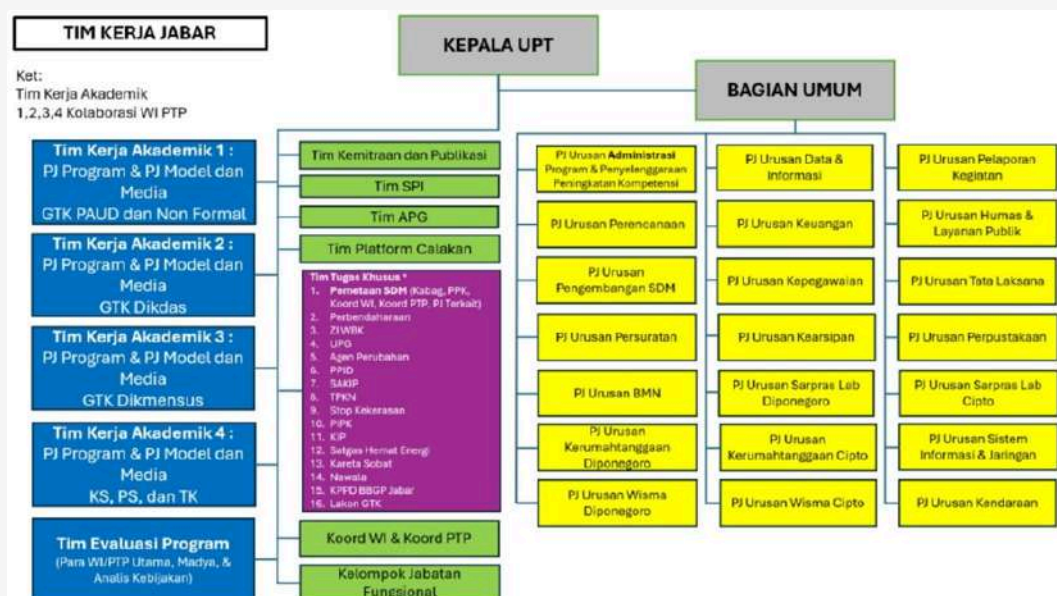
### Struktur Organisasi

Susunan organisasi BBGTK Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- a. Kepala Bagian Umum;
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan. Sementara itu, untuk mempercepat proses koordinasi serta pengelolaan kegiatan dibentuk Tim Kerja sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi BBGTK Jawa Barat sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Organisasi BBGTK Jawa Barat



## Isu Strategis

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

**1. Kebutuhan Kepala Sekolah satuan Pendidikan belum terpenuhi**

Saat ini kebutuhan kepala sekolah yang menjadi pemimpin di sekolah belum terpenuhi karena masih terbatasnya guru yang diangkat menjadi kepala sekolah oleh pemerintah daerah dan masih belum tersedianya calon kepala sekolah dari unsur guru yang mengikuti Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS).

**2. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan**

Masih terdapat kesenjangan kompetensi guru di berbagai daerah Jawa Barat, terutama terkait fasilitasi literasi, numerasi, dan pemanfaatan teknologi digital di sekolah. Sebagian besar guru masih menggunakan pola pembelajaran tradisional, berpusat pada guru

**3. Implementasi Program Prioritas Nasional**

Tantangan dalam memastikan program prioritas nasional benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah. Terdapat kesenjangan antara hasil pelaksanaan program pelatihan dengan implementasi di sekolah dan pemenuhan kebutuhan belajar peserta pelatihan.

**4. Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital Kemendikdasmen.**

Guru dan tenaga kependidikan belum memanfaatkan platform digital dengan baik untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil belajar serta pengembangan diri karena mindset-nya yang belum optimal terhadap perbaikan berkelanjutan

**5. Inklusivitas dan Pemerataan Akses**

Masih ada ketimpangan akses pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

**6. Tata Kelola dan Akuntabilitas**

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan program pendidikan dan pelatihan.

**7. Implementasi Inovasi Pembelajaran belum optimal**

Rendahnya literasi digital dan adaptasi teknologi, mengakibatkan banyak guru belum siap menghadapi tuntutan pembelajaran berbasis teknologi, koding, dan kecerdasan buatan.

**8. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil pemantauan dan evaluasi belum optimal**

Pemanfaatan data hasil pemantauan belum dijadikan rujukan pengembangan program sehingga relevansi antara kebutuhan pengembangan kompetensi GRK dan program yang dijalankan masih belum sinkron.

**9. Tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program belum optimal**

Keterlibatan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, mitra pendidikan, komunitas guru dan tenaga kependidikan, dan organisasi profesi dalam penyelenggaraan program melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif masih belum optimal. BBGTK perlu menentukan strategi koordinasi intensif untuk menggugah keterlibatan pemangku kepentingan tersebut.

## E. Peran Strategis

# Peran Strategis

1. Memberi layanan kerjasama penyelenggaraan pelatihan BCKS melalui mekanisme kerjasama yang diinisiasi pemerintah daerah dengan BBGTK Provinsi Jawa Barat
2. Penguatan komunitas belajar dengan mengembangkan program layanan Pojok Belajar dan Pojok Komunitas untuk memperkuat kualitas pembelajaran. Disamping itu juga dikembangkan program pelatihan inovatif "CALAKAN" secara daring untuk menyesuaikan dengan kebutuhan efisiensi anggaran dan pemerataan dalam peningkatan kompetensi GTK.
3. Evaluasi dan refleksi program dilakukan secara berkala dengan melibatkan dinas pendidikan, fasilitator, dan tim internal.
4. Program inovasi Guru Calakan (platform e-learning), SIMADDU (sistem informasi peserta kegiatan), serta Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah untuk mendukung transformasi digital.
5. Mengadakan program Guru Sahabat Keluarga dan Program Karet Sobat (Karsob) hadir untuk mendukung layanan inklusif dalam rangka Bulan Disabilitas Internasional.
6. Melakukan koordinasi yang intens baik berupa rapat koordinasi, audiensi dan layanan konsultasi sebagai bentuk transparansi pengelolaan program pendidikan dan pelatihan baik yang menggunakan dana APBN, APBD, BOS Kinerja/Reguler.
7. Sosialisasi dan pendampingan serta menampilkan praktik baik dan studi kasus nyata dari satuan pendidikan serta program inovasi berupa seminar, pelatihan singkat yang interaktif, menyenangkan, seperti Edumediatek, Gamelan, Karet Sobat, Pojok Belajar, Pojok Komunitas
8. Melakukan evaluasi dampak terhadap pelatihan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelatihan serta penerapan monitoring yang berkelanjutan.
9. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat mutu guru dan tenaga kependidikan. Kemitraan ini diwujudkan melalui koordinasi yang intens dan kerja sama yang saling melengkapi.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA



# BAB II

## Perencanaan Kinerja

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra), BBGTK Jawa Barat merupakan arah kebijakan dan dasar penyelenggaraan program serta kegiatan selama periode 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program/sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam menetapkan target kinerja tahunan, termasuk target pada tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra BBGTK Jawa Barat memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh target kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 merujuk pada indikator dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BBGTK Jawa Barat, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Visi dan Misi BBGTK Jawa Barat Tahun 2025-2029



Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BBGTK Provinsi Jawa Barat mendukung visi Kementerian dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan sumber daya manusia. Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, BBGTK Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan berlandaskan nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta menerapkan budaya pelayanan RAMAH dan SANTUN, serta Budaya Kerja JUARA. Melalui penerapan nilai dan budaya kerja tersebut, BBGTK Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengedepankan inovasi dan pelayanan prima dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.



# MISI

Sesuai tugas dan kewenangannya, BBGTK Provinsi Jawa Barat turut mendukung misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan misi Presiden terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3. Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan



## Tujuan Strategis

Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat adalah mendukung rumusan tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas BBGTK Provinsi Jawa Barat. Tujuan BBGTK Provinsi Jawa Barat yang mendukung tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

1. Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan.
2. Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

## Matriks Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBGTK Provinsi Jawa Barat serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BBGTK Provinsi Jawa Barat menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 1. Matriks Kinerja

Kode	Sasaran Kegiatan /Indikator	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan						
IKK	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	persen	1.31	1.44	1.58	1.74	1.91
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	Predikat	A	A	A	A	A
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

## B. Program Prioritas 2025

BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program program Pendidikan bermutu turut serta melaksanakan kegiatan berikut ini.

### 1. Program Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM)

Pembelajaran Mendalam (PM) merupakan pendekatan pembelajaran yang memuliakan peserta didik. Pembelajaran Mendalam menekankan penciptaan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dengan mengembangkan potensi peserta didik secara holistik dan terpadu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga.

### 2. Program Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kompetensi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan menyiapkan guru untuk mendukung koding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan dari jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

### 3. Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah

Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi bakal calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan, sesuai dengan

Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepala sekolah yang terpilih memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.

4. Program Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan/atau Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Guru dalam pembinaan karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karier Murid serta pembelajaran yang bernuansa BK yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan suasana satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

5. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Tenaga Laboran, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Administrasi sekolah)

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan merupakan bagian dari program Kepemimpinan Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirancang salah satunya untuk menguatkan dan mengembangkan kompetensi kepala tenaga kependidikan serta tenaga kependidikan khususnya tenaga laboran, tenaga perpustakaan dan tenaga administrasi sekolah.

6. Program PKB Matematika Gembira

Pelatihan ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk mendukung Gerakan Numerasi Nasional (GNN). Tujuan pelatihan ini adalah peningkatan kemampuan matematika dasar yang merupakan pondasi numerasi murid.

Peningkatan kemampuan numerasi murid diawali dengan peningkatan kemampuan matematika. Untuk meningkatkan kemampuan murid dibutuhkan guru yang menguasai content knowledge dan pedagogical content knowledge matematika, sehingga terbentuk pola pikir bertumbuh dan strategi pembelajaran matematika yang menarik. Salah satu upaya yang dilakukan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan content knowledge dan pedagogical content knowledge matematika guru adalah melaksanakan pelatihan matematika dengan menggunakan alur Gali dan Eksplorasi konteks, Muat konten, Buat aktivitas, Ikuti pemikiran murid, Rayakan dan Akhiri pembelajaran (GEMBIRA) bagi guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

7. Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI)

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung proses transisi dimana Mata pelajaran Bahasa Inggris, telah ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar mulai tahun 2027 (Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan guru dalam mengajar Bahasa Inggris di Sekolah Dasar sesuai ketentuan regulasi tersebut.

Tabel 2. Program prioritas yang dilakukan oleh BBGTK Jawa Barat

No	Nama Program Prioritas	Target 2025	Alokasi Anggaran 2025
1	Program Pelatihan Pembelajaran Mendalam	1.987	10.225.797.000,00
2	Program Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artificial	64	604.700.000,00
3	Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah	674	3,443,472,000
4	Program Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan/atau Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1.950	5.384.608.000,00
5	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Tenaga Laboran, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Administrasi sekolah)	216	935.298.000,00
6	Program PKB Matematika Gembira	216	1.144.017.000,00
7	Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI)	266	1.228.907.000,00

### C. Rencana Kerja dan Anggaran

Berikut ini adalah rencana kerja dan anggaran tahun 2025

Tabel 3. Rencana Kerja BBGTK Jawa Barat Tahun 2025

KRO	Uraian	DIPA Awal	DIPA Akhir
138.03.D I	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	171.486.562.000	88,414,022,000

7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	171.486.562.000	41,740,347,000
DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	85.692.000	33,446,011,000
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	41.221.726.000	14,313,621,000
SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	130.179.144.000	40,654,390,000
138.03. WA	Program Dukungan Manajemen	47.578.282.000	42,620,794,000
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	47.578.282.000	42,620,794,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	47.578.282.000	41,740,347,000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	880,447,000
<b>TOTAL</b>		<b>219.064.844.000</b>	<b>131,034,816,000</b>

Tabel 4. Rincian Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Kegiatan	Alokasi
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1.31	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	88,414,022,000
Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Sangat Baik	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	41.740.347.000
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar	A		880.447.000

	GTK Provinsi Jawa Barat minimal A			
--	-----------------------------------	--	--	--

Pada tahun 2025, DIPA BBGP Jawa Barat tahun 2025 sebesar Rp. 219.064.844.000 (Dua ratus sembilan belas milyar enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Setelah mengalami perubahan nama lembaga dan beberapa kali revisi, DIPA BBGTK Jawa Barat tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 131,034,816,000,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp. 88,414,022,000,- (Delapan puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta dua puluh dua ribu rupiah), dan anggaran kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar Rp. 42,620,794,000,- (empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

#### D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BBGTK Jawa Barat Nomor: 0525/B7.2/OT.01.00/2025, BBGTK Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 5. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BBGTK Jawa Barat Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan						
IKK	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	persen	1.31	1.44	1.58	1.74	1.91
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat						
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	Predikat	A	A	A	A	A

	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
--	--	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BBGTK Provinsi Jawa Barat menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui rewiu rencana strategis.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target Perjanjian Kinerja		
			Target Kinerja	Alokasi Anggaran PK Awal	Alokasi Anggaran PK Akhir
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1.31	171.486.562.000	88,414,022,000
Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik	41.221.726.000	41.740.347.000
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	Predikat	A	-	880.447.000
Total				219.064.844.000	131,034,816,000

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat disusun sebagai penyesuaian atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, seiring terjadinya perubahan pada alokasi anggaran, penyesuaian indikator, pergantian pejabat serta dinamika pelaksanaan program selama tahun berjalan.

Revisi Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja tetap realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas strategis kementerian serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja revisi, BBGTK

Provinsi Jawa Barat menegaskan kembali komitmen untuk mencapai sasaran kinerja yang telah diperbarui dan menjadikan dokumen ini sebagai dasar pengukuran capaian kinerja akhir tahun 2025.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

Pada tahun 2025, BBGTK Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target/anggaran pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya pergantian pimpinan dan penurunan alokasi anggaran.

Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 219.064.844.000 menjadi Rp. 131,034,816,000.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

### A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban BBGTK Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, BBGTK Jawa Barat melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja BBGTK Jawa Barat pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan.

BBGTK Jawa Barat telah melakukan analisis terhadap capaian yang belum optimal dan merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai penguatan integrasi perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen BBGTK Jawa Barat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, BBGTK Jawa Barat menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persentase	1.31	1.59	121,37%

2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	108,21 %
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	Predikat	A	AA	114,06 %

## Sasaran

SK 1 Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan

1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

### 1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) "Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran" merupakan indikator strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memfasilitasi peningkatan kapasitas profesional guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagai pilar utama proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Guru dan tenaga kependidikan memainkan peran sentral dalam transformasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, keberlanjutan dalam peningkatan kompetensi mereka sangat penting untuk menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21, termasuk tuntutan literasi digital, pembelajaran berdiferensiasi, serta pendekatan pembelajaran berbasis siswa. Indikator ini menjadi representasi dari keberpihakan kebijakan pembangunan sumber daya manusia terhadap penguatan kapasitas GTK, sekaligus menjadi bagian integral dalam pelaksanaan reformasi pendidikan.

Secara operasional, indikator ini diukur dari rasio jumlah GTK yang mengikuti dan mendapatkan fasilitasi pelatihan, workshop, bimbingan teknis, atau program peningkatan kapasitas lainnya, terhadap jumlah GTK yang ditargetkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Fasilitasi yang dimaksud meliputi baik kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat maupun daerah, termasuk program-program kolaboratif dengan lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru dan mitra pembangunan.

Penguatan kebijakan ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, antara lain:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 sebagai revisi atas PP Nomor 74 Tahun 2008, yang menegaskan kembali posisi guru sebagai tenaga profesional; serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, yang menuntut ASN, termasuk GTK, untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam kerangka sistem merit.

Lebih lanjut, kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029 yang menekankan pada transformasi sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan indikator ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, melalui unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai wilayah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas fasilitasi yang diberikan. Dengan demikian, IKK ini tidak hanya menjadi alat ukur kinerja program, tetapi juga refleksi nyata dari komitmen negara dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

## 2. Perhitungan Indikator Kinerja

Dihitung berdasarkan persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.

Rumus perhitungan

$$A = \frac{(B)}{C} \times 100\%$$

A = Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran;

B = Jumlah Guru dan Pendidik yang berpartisipasi aktif dalam program seperti pelatihan teknis, workshop pedagogis, bimbingan teknis, dan bentuk pengembangan profesional lainnya selama periode evaluasi;

C = Jumlah Total Sasaran Guru dan Pendidik yang teridentifikasi dalam perencanaan tahunan sebagai target peserta program pengembangan kompetensi.

Satuan	: Persen
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Balai Besar/ Balai/ Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan
Sumber Data	: Data Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Level Estimasi	: Provinsi, Kabupaten/Kota
Klasifikasi	: Lainnya
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Tidak
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

3. Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGP Provinsi Jawa Barat digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1,31	1,59	121,31 %

Tabel 8. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Target dari IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran untuk tahun 2025 adalah sebesar 1.31 %. Jumlah sasaran menurut renstra sebesar 5.132 orang. Dari tabel rekapitulasi jumlah realisasi capaian di tahun 2025 sebanyak 6.242 orang, sehingga persentasenya sebesar 121.31 %.

4. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan didukung Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 3 indikator

- a. Pelatihan Bidang Pendidikan
- b. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- c. Pelatihan Bidang Pendidikan

Program yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator kinerja

- A. Pelatihan Bidang Pendidikan

Pelatihan Fasda Program BK

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Guru dalam pembinaan karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karier Murid

serta pembelajaran yang bernuansa BK yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan suasana satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Pada program ini, setiap peserta dibekali kemampuan dasar dalam memberikan bimbingan yang bermakna. Melalui program "7 Jurus BK Hebat", pendekatan ini dikemas secara kreatif dan praktis agar lebih segar, mudah diterapkan, dan menggembirakan.

Tujuan program ini::

1. Meningkatkan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling dalam memberikan layanan BK kepada Murid agar dapat melakukan pembinaan karakter positif dan mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karier secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan Kompetensi Guru kelas dan Guru mata pelajaran dalam menyelenggarakan pembelajaran bernuansa BK dalam mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya sesuai dengan psikososial.

Pelaksanaan Pembelajaran Pelatihan Fasda BK dengan total 59 JP

- a) Aktivitas Belajar Mandiri Melalui LMS (9 JP)
- b) Tatap Muka Pelatihan Intensif dilaksanakan luring secara berturut-turut sebesar 30 (tiga puluh) JP
- c) OJL selama 4 (empat) minggu atau setara 20 (dua puluh) JP
  1. Implementasi Jurus BK Hebat
  2. Berbagi pengetahuan dan praktik baik implementasi 7 Jurus BK Hebat kepada seluruh Guru BK dan Non BK
  3. Unggah Bukti Implementasi dan Sosialisasi



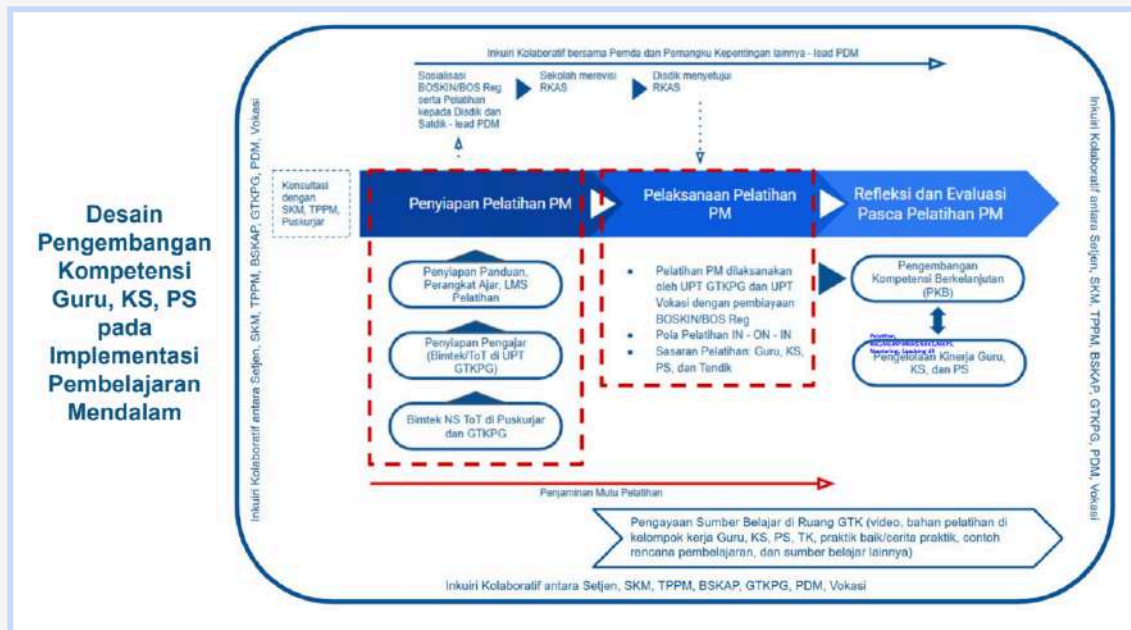
Gambar 5. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Pelatihan Fasda BK

## B. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan Program Pembelajaran Mendalam (TOT Calon Fasilitator Pembelajaran Mendalam)

Pembelajaran Mendalam (PM) merupakan pendekatan pembelajaran yang memuliakan peserta didik. Pembelajaran Mendalam menekankan penciptaan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dengan mengembangkan potensi

peserta didik secara holistik dan terpadu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga.



Gambar 6. Desain Pengembangan Kompetensi Guru, KS, PS pada Implementasi Pembelajaran Mendalam

### C. Pelatihan Bidang Pendidikan

Program ini didukung oleh beberapa program tenaga kependidikan

#### 1. Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah

Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi bakal calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan, sesuai dengan Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepala sekolah yang terpilih memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.

#### 2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Tenaga Laboran, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Administrasi sekolah)

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan merupakan bagian dari program Kepemimpinan Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirancang salah satunya untuk menguatkan dan mengembangkan kompetensi kepala tenaga kependidikan serta tenaga kependidikan khususnya tenaga laboran, tenaga perpustakaan dan tenaga administrasi sekolah.

#### 3. Program PKB Matematika Gembira

Pelatihan ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk mendukung Gerakan Numerasi Nasional (GNN). Tujuan pelatihan ini adalah peningkatan kemampuan matematika dasar yang merupakan pondasi numerasi murid.

Peningkatan kemampuan numerasi murid diawali dengan peningkatan kemampuan matematika. Untuk meningkatkan kemampuan murid dibutuhkan

guru yang menguasai *content knowledge* dan *pedagogical content knowledge* matematika, sehingga terbentuk pola pikir bertumbuh dan strategi pembelajaran matematika yang menarik. Salah satu upaya yang dilakukan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan *content knowledge* dan *pedagogical content knowledge* matematika guru adalah melaksanakan pelatihan matematika dengan menggunakan alur Gali dan Eksplorasi konteks, Muat konten, Buat aktivitas, Ikuti pemikiran murid, Rayakan dan Akhiri pembelajaran (GEMBIRA) bagi guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

4. Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI)

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung proses transisi dimana Mata pelajaran Bahasa Inggris, telah ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar mulai tahun 2027 (Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan guru dalam mengajar Bahasa Inggris di Sekolah Dasar sesuai ketentuan regulasi tersebut.

5. Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Jenjang SMP dan SMA

Pelatihan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris jenjang SMP dan SMA yang bertujuan untuk:

- Memahami dinamika motivasi siswa dalam konteks EFL (English as a Foreign Language) di Indonesia
- Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong otonomi, relevansi, dan interaksi sosial positif
- Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung rasa percaya diri dan partisipasi aktif siswa
- Merefleksikan praktik pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan siswa

Berikut rekapitulasi capaian kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Tabel 9. Rekapitulasi Capaian Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Capaian Peserta
1	Pelatihan Fasda Program BK	2.517
2	TOT Calon Fasilitator Pembelajaran Mendalam	1.471
3	Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah	671
4	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah	130
5	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboran	113
6	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan	72
7	Pelatihan PKB Matematika Gembira	216

8	Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI)	242
9	Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Jenjang SMP dan SMA	810
TOTAL		6.242

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran untuk tahun 2025 adalah sebanyak 6.242 orang.

5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja Pencapaian target Indikator Kinerja 1.1 yang melebihi dari target yakni sebesar 121,31 % didukung oleh:
  1. Perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik
  2. Kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan
  3. Optimalisasi anggaran
  4. Program Inovasi
  
6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025  
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :
  1. Koordinasi antara Fasda BK, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan di daerah belum berjalan optimal, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak lanjut.
  2. Kurang antusiasmenya tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan data tidak update sehingga banyak mismatch antara tenaga kependidikan yang diundang dengan kebutuhan pelatihan.
  3. Kendala sistem KSPSTK yang masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian ke arah yang lebih baik, berpengaruh kepada kelancaran pelaksanaan pelatihan BCKS, (tidak munculnya data dalam system).
  4. Linimasa penyelesaian program prioritas berada di triwulan ke IV (Program BK, PKG Bahasa Inggris, Program Tendik, Program Pembelajaran Mendalam, Program KKA, Program Matematika Gembira, Kegiatan HGN dan program inovasi lainnya) sehingga diperlukan strategi dalam mengatur jadwal maupun sumber daya manusia yang akan ditugaskan atau menangani kegiatan
  
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025
  1. Pembagian peran yang jelas antara Fasda BK, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan, serta melakukan advokasi dan pendampingan dalam melaksanakan tindak lanjut.
  2. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk menghadirkan tendik yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi di lapangan untuk menjadi peserta pelatihan peningkatan kompetensi. Strategi selanjutnya, bersama dengan Dinas Pendidikan melakukan pemetaan ulang data tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
  3. Berkoordinasi dengan direktorat KSPSTK terkait pelaksanaan seleksi substansi dan jadwal pelaksanaan pelatihan BCKS agar pelatihan dapat dilaksanakan tepat waktu

4. Melakukan rapat internal untuk mengatur jadwal dan pemetaan sumber daya manusia. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk bersama-sama mengelola pelaksanaan kegiatan dengan kecukupan SDM dan ketepatan waktu.
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025
  - a. Melakukan Diklat inovasi tentang pendampingan pembelajaran terhadap pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, Pengawas, Kepala Laboratorium)
  - b. Melakukan rapat koordinasi internal maupun eksternal secara rutin, baik secara daring maupun luring dalam menyusun dan mensosialisasikan timeline pelaksanaan kegiatan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
  - c. Berkoordinasi aktif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sasaran di setiap pelaksanaan
  - d. Melakukan program inovasi dan strategi pencapaian target dengan melakukan pengimbasan terhadap peserta lainnya
  - e. Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan
  - f. Penyesuaian program/kegiatan (pola kegiatan, pengurangan petugas)
9. Analisis keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tahun 2025  
Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja, BBGTK Jawa Barat telah berhasil mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan.  
Pada Indikator Kinerja kegiatan 1.1, persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran mengalami peningkatan 21,31 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran sebanyak 6,242 orang dari target sebesar 5.132 orang.

## SK 2 Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat

### 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik

#### 1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), baik dari sisi perencanaan maupun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). NKA menjadi cerminan dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Penilaian NKA dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui evaluasi kinerja anggaran secara berjenjang, yang mencakup level satuan kerja (satker), unit eselon I, hingga keseluruhan Kementerian atau Lembaga. Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam rangka pengawasan dan pembinaan tata kelola fiskal serta sebagai dasar dalam pemberian intensif maupun sanksi kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi kinerja anggaran mencakup dua dimensi utama, yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA) mengukur efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan aspek penghematan, kesesuaian kebutuhan, serta optimalisasi alokasi sumber daya. Penilaian EKA didasarkan pada ketepatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang realistis, kredibel, serta sesuai dengan prioritas pembangunan. Kategori penilaian EKA adalah sebagai berikut:
  - Sangat Baik: >90
  - Baik: >80-90
  - Cukup: >60-80
  - Kurang: >50-60
  - Sangat Kurang: ≤50
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengukur kualitas pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan efisiensi dalam realisasi belanja negara. Evaluasi IKPA dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama: kualitas perencanaan, kualitas implementasi, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:
  - Sangat Baik: ≥95
  - Baik:  $89 \leq \text{IKPA} < 95$
  - Cukup:  $70 \leq \text{IKPA} < 89$
  - Kurang: <70

Integritas antara EKA dan IKPA menghasilkan NKA yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang kinerja anggaran K/L dari hulu ke hilir. Penggunaan NKA dalam proses evaluasi kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur administratif, melainkan juga sebagai dasar perbaikan kebijakan, penajaman alokasi anggaran, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, capaian NKA yang tinggi menjadi indikator keberhasilan manajemen keuangan publik yang mendukung tercapainya sasaran strategis nasional secara efektif dan berkelanjutan.

2. Perhitungan Indikator Kinerja  
Metode Perhitungan

$$\text{NKA} = [\text{EKA} \times 50\%] + [\text{IKPA} \times 50\%]$$

*Keterangan:*  
Sangat Baik (>90);

Baik (>80-90);  
 Cukup (>60-80);  
 Kurang (>50-60);  
 Sangat Kurang ( $\leq$ 50).

Satuan	: Nilai
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat
Sumber Data	: Aplikasi Monev Anggaran Kementerian Keuangan (SMART Kemenkeu)
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Level Estimasi	: Provinsi, Kabupaten/Kota
Klasifikasi	: Lainnya
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Tidak
Frekuensi penyajian data	: 1 Kali

- Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGP Provinsi Jawa Barat tahun berjalan digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	108,21 %

Tabel 10. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik

Berdasarkan data dari Aplikasi Monev Anggaran Kementerian Keuangan (SMART Kemenkeu) BBGTK Jawa Barat mendapatkan predikat Sangat Baik dengan nilai 97,39, sehingga kinerja Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik sebesar 108,21 dengan perhitungan nilai capaian nilai kinerja anggaran

BBGTK Jawa Barat yaitu Predikat Sangat Baik sebesar 97,39 dibandingkan dengan nilai terendah Predikat Sangat Baik yaitu 90.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir renstra digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025			Target akhir renstra Tahun 2025-2029	Capaian tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	108,21 %	Sangat Baik	108,21 %

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik tahun 2025 dengan target Akhir Renstra 2025-2029

Pada tahun 2025 BBGTK Jawa Barat mendapatkan predikat Sangat Baik dengan nilai 97,39, sehingga kinerja Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik dengan target Akhir Renstra 2025-2029 sebesar 108,21 dengan perhitungan capaian nilai kinerja anggaran BBGTK Jawa Barat tahun 2025 yaitu Predikat Sangat Baik sebesar 97,39 dibandingkan dengan capaian target akhir Renstra 2025-2029 nilai terendah predikat Sangat Baik dengan yaitu 90.

4. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Dalam upaya mendukung capaian Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan yang dilakukan dengan:

- a. Meminimalisir revisi DIPA
- b. Meminimalisir deviasi halaman III DIPA dengan menjaga konsistensi antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran bulanan
- c. Menjaga kesesuaian antara penyerapan anggaran sesuai target triwulanan.
- d. Menjaga ketepatan waktu dalam pendaftaran kontrak ke KPPN (belanja kontraktual)
- e. Memproses penyelesaian tagihan (maksimal 5 hari kerja setelah BAST)
- f. Menjaga kepatuhan pengelolaan uang persediaan (pengelolaan UP/TUP)
- g. Menjaga tingkat kepatuhan dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) agar tidak melampaui batas waktu (dispensasi SPM)
- h. Memastikan sinkronisasi antara progres fisik (PCRO) dan realisasi anggaran (RVRO) agar tidak terjadi anomali, serta tepat waktu dalam pengisian data capaian output

5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja

- a. Melakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran dan keuangan;
- b. Melakukan reviu atas Standard Operasional Prosedur terkait pengelolaan anggaran dan keuangan.

6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025
  - a. Diperlukan beberapa penyesuaian terhadap komponen kegiatan yang ada di RKAKL (tahapan kegiatan, satuan biaya);
  - b. RPD tidak sesuai dengan penyerapan karena sulit menetapkan penjadwalan karena mengikuti kebijakan pusat dan ketersediaan tempat/lokasi kegiatan (lokasi kegiatan di BBGTK Jawa Barat / satuan kerja terdekat)
  - c. Masih terdapat pagu anggaran yang di blokir sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran;
  - d. Pengumpulan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak tepat waktu menunda proses pencairan , baik melalui mekanisme Uang Persediaan maupun melalui L/S Bendahara;
  - e. Adanya keterlambatan pelaporan kontrak pengadaan dari Bagian Pengadaan ke Bagian Keuangan
  - f. Data pendukung kontrak yang tidak lengkap dari bagian pengadaan mempengaruhi proses penyelesaian tagihan;
  
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025
  - a. Mengoptimalkan anggaran dengan revisi POK lakukan revisi RKA-KL (POK, DIPA)
  - b. Memastikan pada Tim Kerja/Penanggung Jawab agar menyusun ulang terkait strategi penjadwalan
  - c. Melakukan rapat internal terkait strategi penyerapan anggaran
  - d. Koordinasi dengan pegawai yang bertugas untuk memprioritaskan pengumpulan dokumen, dan menetapkan batas waktu yang jelas dan tegas untuk pengumpulan dokumen;
  - e. Koordinasi rutin antara bagian pengadaan dan bagian keuangan untuk memantau proses pelaporan;
  - f. Membuat ceklist kelengkapan dokumen kontrak
  
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025  
Strategi pencapaian nilai kinerja anggaran yang optimal melalui:
  - a. Perencanaan Anggaran yang Matang dan Akurat
  - b. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran
    - Optimalisasi penyerapan anggaran,
    - Pengelolaan Belanja Kontraktual yang Efektif (tepat waktu)
    - Manajemen Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang Akuntabel:
    - Fokus pada Capaian Output/Keluaran
  - c. Peningkatan Kompetensi SDM dan Tata Kelola
  - d. Evaluasi internal
  
9. Analisis keberhasilan capaian kinerja tahun 2025  
Keberhasilan pencapaian nilai kinerja anggaran dengan kategori "Sangat Baik" merupakan kinerja seluruh tim dalam pengelolaan anggaran yang didukung komitmen pimpinan yang kuat dan kompetensi SDM yang memadai

## 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A

### 1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan komponen esensial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas kinerja mencerminkan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan.

Predikat SAKIP Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan ukuran agregat atas kualitas penyelenggaraan sistem manajemen kinerja dalam lingkup unit organisasi tersebut. Penilaian SAKIP tidak sekadar berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi lebih menekankan pada sejauh mana instansi mampu mengelola kinerjanya secara efisien, efektif, dan berorientasi hasil.

Capaian predikat tinggi pada evaluasi SAKIP mencerminkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program, penggunaan sumber daya yang bijak, serta komitmen terhadap akuntabilitas publik.

Penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi sistem ini dilaksanakan secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan pedoman teknis dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan terhadap lima komponen utama, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Penilaian ini menghasilkan nilai akuntabilitas yang diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori predikat, dari D (sangat kurang) hingga AA (sangat memuaskan). Tujuan utama dari indikator ini adalah untuk menstimulasi peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh, memperkuat budaya kerja berbasis hasil (*result oriented culture*), serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Capaian predikat SAKIP yang tinggi juga menjadi refleksi atas perbaikan tata kelola, efektivitas implementasi kebijakan, serta kualitas belanja publik yang semakin baik.

Di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat, upaya pencapaian predikat SAKIP yang optimal dilakukan melalui penguatan kapasitas perencanaan strategis, peningkatan kualitas data kinerja, pembinaan teknis berkelanjutan, serta evaluasi internal yang konstruktif. Hasil penilaian SAKIP tidak hanya menjadi indikator keberhasilan manajerial, tetapi juga berperan sebagai dasar dalam menetapkan arah perbaikan organisasi ke depan.

### 2. Perhitungan Indikator Kinerja

Metode Perhitungan

Rumus Perhitungan:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%] + [\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%] + [\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%] + [\text{Evaluasi Kinerja} \times 25\%]$$

Keterangan:

Porsi Perencanaan Kinerja = 30%;

Porsi Pengukuran Kinerja = 30%;

Porsi Pelaporan Kinerja = 15%

Porsi Evaluasi Kinerja = 25%

Kategori Nilai SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang

Satuan	: Predikat
Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat
Sumber Data	: Lembar Hasil Evaluasi Final dari Aplikasi SPASIKITA
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Level Estimasi	: Provinsi, Kabupaten/Kota
Klasifikasi	: Lainnya
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Tidak
Frekuensi penyajian data	: 1 Kali

- Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun berjalan digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	A	AA	114,06 %

Tabel 12. Target dan Realisasi Capaian atas IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, BBGTK Jawa Barat mendapatkan predikat AA dengan nilai 91,25, sehingga kinerja Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBGTK Provinsi Jawa Barat minimal A sebesar 114,06 dengan perhitungan nilai capaian SAKIP BBGTK Jawa Barat yaitu Predikat AA sebesar 91,25 dibandingkan dengan nilai terendah Predikat A yaitu 80.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir renstra digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025			Target akhir renstra Tahun 2025-2029	Capaian tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	A	AA	114,06 %	A	114,06 %

Tabel 13. Perbandingan Capaian atas IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A dengan target akhir Renstra 2025-2029

Pada tahun 2025 BBGTK Jawa Barat mendapatkan predikat AA untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai 91,25, sehingga Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir renstra sebesar 114,06 dengan perhitungan nilai capaian SAKIP BBGTK Jawa Barat tahun 2025 yaitu Predikat AA sebesar 91,25 dibandingkan capaian target akhir Renstra 2025-2029 nilai terendah Predikat A yaitu 80.

4. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja
  1. Penyusunan Dokumen :
    - a. Program 2025 (DIPA/RKA-KL);
    - b. Rencana Aksi;
    - c. Perjanjian Kinerja
    - d. Rencana Strategis
    - e. SKP
    - f. Manajemen Risiko
    - g. Pengukuran Kinerja
    - h. Laporan Keuangan
    - i. Laporan Kinerja
    - j. Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Mandiri;
    - k. Penyusunan Dokumen dan data dukung ZI-WBK
  2. Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP
5. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja
  - a. Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Perencanaan dan Ditjen GTK sebagai Eselon I terkait implementasi SAKIP;
  - b. Komitmen pimpinan dan pegawai untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja;
  - c. Integrasi perencanaan dan penganggaran
6. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025
  - a. Data dukung SAKIP belum tertata dan terorganisir dengan baik;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data pengukuran kinerja belum optimal;
  - c. Kurangnya koordinasi, komunikasi dan pemahaman tim kerja dalam pemenuhan dokumen lembaga;
7. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025
  - a. Melengkapi dokumen dan melakukan penataan serta update data dukung SAKIP;
  - b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan tim data;
  - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan rapat dengan tim kerja;
8. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025
  - a. Komitmen Pimpinan dan seluruh tim untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan SAKIP.

- b. Memastikan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berjalan konsisten, efisien, dan terintegrasi, yang diukur melalui evaluasi internal.

## 9. Analisis keberhasilan capaian kinerja tahun 2025

Keberhasilan pencapaian Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat AA melampaui target yang telah ditetapkan, merupakan kinerja seluruh tim dalam Implementasi SAKIP secara Terintegrasi yang didukung komitmen pimpinan yang kuat dan kompetensi SDM yang memadai

### Realisasi Program/Agenda Prioritas

No	Nama Program Prioritas	Target	Realisasi
1	Program Pelatihan Pembelajaran Mendalam	1.987	1.863
2	Program Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artificial	62	34
3	Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah	674	671
4	Program Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan/atau Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1.950	2.517
5	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Tenaga Laboran, Tenaga Perpustakaan, dan Tenaga Administrasi sekolah)	216	315
6	Program PKB Matematika Gembira	216	216
7	Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI)	266	242

Tabel 14. Realisasi Program/Agenda Prioritas

## B. Realisasi Anggaran

Gambar 7. Sejarah Anggaran BBGTK Jawa Barat Tahun 2025



### 1. Capaian Anggaran

Pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada BBGTK Jawa Barat menunjukkan kinerja yang efektif dan akuntabel. Realisasi anggaran mencapai tingkat serapan yang optimal dan sejalan dengan capaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui perencanaan yang terarah, pengendalian internal yang konsisten, serta penyesuaian kegiatan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program.

Pagu anggaran BBGTK Jawa Barat dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp. 131,034,816,000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 103.203.369.731 dengan persentase daya serap sebesar 78,76%. Namun dari alokasi tersebut masih ada alokasi blokir sebesar Rp. 26,232,395,000 yang tidak bisa direvisi buka blokir dan tidak dapat diperhitungkan sebagai realisasi. Sehingga bila tanpa anggaran blokir maka persentase daya serap sebesar 98,47%

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

KRO	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
138.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	88,414,022,000	62.180.202.939	70,33
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	33,446,011,000	33.445.567.285	100,00
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	14,313,621,000	14.313.541.334	100,00
SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	40,654,390,000	14.421.094.320	35,47
138.03.WA	Program Dukungan Manajemen	42,620,794,000	41.023.166.792	96,25
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	41,740,347,000	40.142.819.801	96,17
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	880,447,000	880.346.991	99,99
	TOTAL	131,034,816,000	103.203.369.731	78,76

Tabel 15 Realisasi anggaran per program Tahun 2025 BBGTK Jawa Barat

Catatan :

Terdapat blokir di RO 7614.SCI sebesar Rp. 26.232.395.000,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program	88,414,022,000	62.180.202.939	70,33

		peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran			
2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	41.740.347.000	40.142.819.801	96,17
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	880.447.000	880.346.991	99,99

Tabel 16. Realisasi anggaran per program Tahun 2025 BBGTK Jawa Barat



Gambar 7. Capaian Anggaran Tahun 2025

## 2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja pada satuan kerja. Pada tahun 2025, BBGTK Provinsi Jawa Barat berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 36,84% atau sebesar Rp.20.721.442.655.

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari

- a. Penghematan Belanja perjalanan dinas (at cost)
- b. Optimalisasi kegiatan paket meeting fullboard, fullday, dan halfday (pemanfaatan sekolah/instansi pemerintah sebagai tempat kegiatan)
- c. Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring

Anggaran hasil efisiensi dioptimalisasikan kembali untuk memperbanyak volume output dari kegiatan dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program prioritas dan program inovasi melalui berbagai kegiatan diantaranya:

1. Program-program Inovasi
2. Kegiatan Administrasi Profesi Guru
3. Kegiatan pendukung program prioritas (Rakor, Koordinasi, Refleksi, Evaluasi)
4. Rangkaian kegiatan apresiasi GTK dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN)
5. Program Kemitraan

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menunjukkan bahwa BBGTK Provinsi Jawa Barat mampu mencapai target kinerja secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Realisasi anggaran 103.203.369.731 berada di bawah pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp. 131,034,816,000., tanpa mengurangi kualitas keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang direncanakan. Efisiensi tersebut terutama diperoleh melalui optimalisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, pengurangan biaya non-prioritas, serta konsolidasi kegiatan yang memiliki kesamaan sasaran.

Meskipun terjadi penghematan anggaran, capaian kinerja tetap berada pada atau di atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa BBGTK Provinsi Jawa barat berhasil menerapkan prinsip value for money, yaitu mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa barat menggambarkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil, serta mendukung upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029.

## C. Kinerja Lain-lain

### 1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BBGTK Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan

publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen organisasi dalam melakukan perbaikan pada seluruh aspek secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Peningkatan integritas aparatur serta kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
3. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan adaptif.
4. Penanaman peran pimpinan dan pegawai sebagai *role model* dalam mengimplementasikan semangat perubahan tata kelola kelembagaan.
5. Pengembangan dan penerapan inovasi pada berbagai aspek pelayanan publik.
6. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan
7. Peningkatan ketaatan terhadap regulasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur serta kinerja lembaga.
8. Penguatan sistem pengawasan internal sebagai upaya pencegahan dan pengendalian risiko.
9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan serta sinkronisasi dokumen pendukung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

## 2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Pada tahun 2025 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja.

The infographic consists of 12 numbered boxes, each with a title and a list of activities. The boxes are arranged in a grid-like fashion with decorative dotted lines separating them. Each box has a unique color and a small icon related to its theme.

- 1 Program Pelatihan Pembelajaran Mendalam**
  - Pelatihan Pembelajaran Mendalam yang menggunakan mekanisme PNPB Fungsional, melalui anggaran BOS Kinerja dan BOS Reguler dari satuan pendidikan, di 27 Kab Kota
  - Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM) bagi Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kerja Sama dengan PERSIS
  - Rangkaian persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Program Pelatihan Pembelajaran berupa kegiatan rapat koordinasi (Program, Data, Pembiayaan)
- 2 Program Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artfisial**
  - Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artfisial yang menggunakan mekanisme PNPB Fungsional, melalui anggaran BOS Kinerja dan BOS Reguler dari satuan pendidikan di 3 Kab Kota
  - Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artfisial (KKA) bagi Guru Jenjang SMP/SMA/SMK Kerja Sama
- 3 Program Pelatihan PKB Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Guru Jenjang SMP**
  - Workshop Penyusunan Program
  - TOT Calon Fasilitator
  - Pelatihan PKB Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Guru Jenjang SMP
  - Diseminasi
- 4 Diklat Daring Calakan**
  - Pelatihan Peningkatan Kompetensi GTK Moda Daring
  - Diklat Guru Calakan Microcredential
- 5 Program APG**
  - Verifikasi dan Validasi Dokumen Pendaftaran UKKJ JF Guru dan Pengawas Sekolah
  - Verifikasi dan Validasi Berkas Seleksi Administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu
  - Koordinasi Permasalahan Laporan Diri di LPTK Penyelenggaraan PPG bagi Guru Tertentu
  - Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Calon Guru
- 6 Guru Sahabat Keluarga**
  - Pelatihan Menciptakan Transformasi Satuan Pendidikan melalui Kerjasama Sekolah dengan Keluarga
  - Pelatihan Kepemimpinan Keluarga dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
- 7 Karet Sobat**
  - Karet Sobat Nganjang ka Pura Agung Parahyangan
  - Karet Sobat Gerakan Numerasi Nasional
  - Karet Sobat Nobar di Acara Porseni
  - Karet Sobat Pameran STEM
- 8 Nyawang Wilayah (Nawala)**

Ekspedisi Nawala BBGTK Provinsi Jawa Barat di Kab. Bandung, Kab. Cianjur dan Kab. Tasikmalaya
- 9 Apresiasi GTK**
  - Pembekalan Juri Apresiasi Jambore GTK tahun 2024
  - Penilaian Substansi, Presentasi, dan Wawancara Apresiasi GTK Hebat Tahun 2025
  - Pembuatan Video Profil GTK Inspiratif Pak Idris
  - Fasilitasi Penjurian Anugrah GTK Kategori Tokoh Masyarakat
  - "MALAM PENGHARGAAN APRESIASI GTK HEBAT 2025 DALAM RANGKA PERAYAAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2025 DI JAWA BARAT"
  - Pelatihan Teknik Presentasi dan Komunikasi Peserta Juara Apresiasi GTK Hebat 2025 Provinsi Jawa Barat
  - Berbagi Praktik Baik GTK Juara Nasional Apresiasi GTK Tahun 2025
- 10 Workshop, Seminar, dan Talkshow**
  - Workshop Numerasi Metode Montesori
  - Workshop Teaching English for Young Learner
  - "International Seminar on STEM Education The Context of Deep Learning Policies"
  - Seminar Internasional Implementation of Global Citizenship Education in Deep Learning to Strengthen Graduate Profile Dimensions
  - Seminar Internasional Empowering Mind: Wher STEAM Meet Coding and AI
  - Seminar Internasional Global Language, Local Impact
  - Talk Show Wajah Pendidikan Indonesia Kuat, Guru dan Ekosistem Berkeadilan
- 11 Program Kemitraan**
  - Pelatihan bagi Komunitas Belajar Guru Bekasi Selatan: Implementasi Pembelajaran Mendalam
  - Peningkatan Kualitas Kinerja Kepala Sekolah dan Operator Dapodik Sekolah Dasar Swasta Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi (kepala sekolah)
  - Peningkatan Kualitas Kinerja Kepala Sekolah Memimpin dengan Visi Menggerakkan dengan Aksi
  - Peningkatan Kompetensi Guru Kab. Waropen: Strategi Implementasi Pembelajaran Mendalam (PM) serta Koding dan Kecerdasan Artfisial (KKA)
  - Diklat Kompetensi Guru PAUD Kabupaten Berau
  - Seminar Media Pembelajaran Lagu bagi GTK PAUD
  - Lomba KICAU (karya Cipta Lagu Anak)
  - Pembekalan Juri Dan Penilaian Seleksi Karya Peserta Jambore Ceria Guru Paud Dan Pnf Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
  - Jambore PAUD Ceria
  - Workshop Integrasi Micro:bit dalam Pembelajaran Sains bagi Guru Jenjang SMP
  - SEAQIL Talks: Nihongo Next Gen Teaching
- 12 Pojok Belajar dan Pojok Komunitas**

Gambar 9. Informasi Capaian Kerja Lainnya yang Mendukung Ketercapaian Indikator Kinerja

### 3. Inovasi

Pada tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat melakukan inovasi :

#### A. Inovasi Program

Gambar 10. Program Inovasi

## PROGRAM INOVASI

**GURU SAHABAT KELUARGA**

Inovasi strategis untuk memperkuat kemitraan sekolah dan keluarga dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang menerapkan pendekatan kolaboratif berbasis Tripusat Pendidikan melalui pelatihan tatap muka dan on the job learning.

**POJOK KOMUNITAS TERBUKA**

Program kolaboratif sebagai ruang belajar bersama yang terbuka dan partisipatif untuk memperkuat kompetensi dan praktik baik guru. agar tercipta lingkungan belajar yang aman serta terbangunnya jejaring komunitas belajar antar pendidik.

**PELATIHAN PKB KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK GURU SMP**

Inovasi peningkatan kapasitas guru dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang aman dan sesuai karakteristik peserta didik SMP yang meningkatkan kesiapan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berperspektif perlindungan peserta didik.

**PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU BAHASA INGGRIS BERBASIS TPACKFUL**

Inovasi peningkatan kompetensi guru Bahasa Inggris berbasis TPACKful yang mengintegrasikan konten, pedagogik, dan teknologi sesuai standar global. Program dilaksanakan melalui blended learning untuk memperkuat teori dan praktik pembelajaran.

**POJOK BELAJAR**

Peningkatan kompetensi bagi komunitas guru dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan melalui diskusi interaktif singkat selama 3 JP tanpa biaya.

Dampaknya meningkatnya akses pengembangan kompetensi yang fleksibel, memperkuat budaya belajar kolaboratif, serta mendukung peningkatan kapasitas GTK secara berkelanjutan.

**PELATIHAN DARING CALAKAN**

Inovasi melalui pembelajaran jarak jauh berbasis LMS Calakan yang memungkinkan GTK dari berbagai wilayah mengikuti pelatihan sinkron dan asinkron tanpa meninggalkan satuan pendidikan.

Dampaknya meliputi peningkatan kompetensi profesional, penguatan budaya belajar sepanjang hayat, dan percepatan transformasi digital pelatihan.

**NAWALA (NYAWANG WILAYAH)**

Inovasi untuk menjangkau satuan pendidikan di wilayah terpencil melalui pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.

Dampaknya meningkatnya literasi dan numerasi peserta didik sekaligus memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di wilayah terpencil.

**KARETA SOBAT**

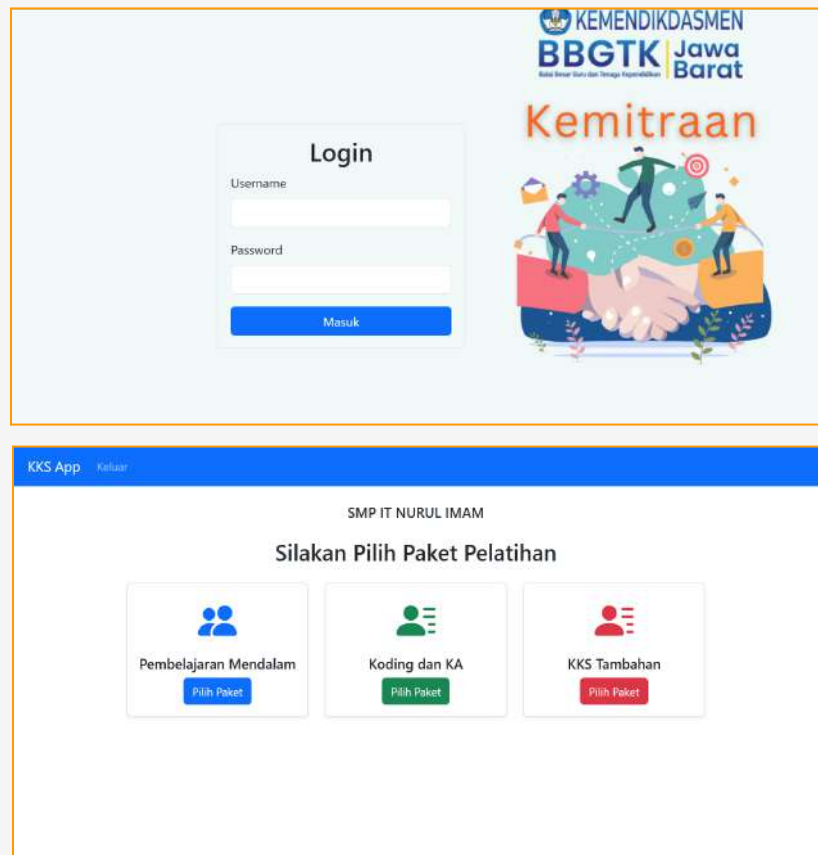
Inovasi layanan pendidikan bergerak untuk menjangkau satuan pendidikan dan masyarakat di wilayah sulit dijangkau. Program ini menghadirkan pelatihan guru, pembelajaran sains interaktif, penguatan karakter, dan layanan pendampingan secara kontekstual.

Dampak adalah meningkatnya akses layanan pendidikan yang inklusif dan merata, memperkuat kompetensi guru, serta menumbuhkan minat belajar

## B. Inovasi Sistem

### 1) Aplikasi pembuatan kontrak kerjasama kemitraan dan PNBP

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan KKS secara digital, mulai dari penginputan data satuan pendidikan, penetapan biaya pelatihan, hingga penyediaan informasi pembayaran. Melalui aplikasi ini, proses penyusunan KKS menjadi lebih sistematis, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Dampak inovasi dari penerapan aplikasi KKS ini antara lain meningkatnya efisiensi waktu dan sumber daya dalam penyusunan kontrak kerja sama, terjaminnya kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan PNBP, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelatihan PM dan KKA. Inovasi ini juga mendukung tata kelola kemitraan yang lebih modern dan adaptif, serta dapat direplikasi untuk program pelatihan lainnya.

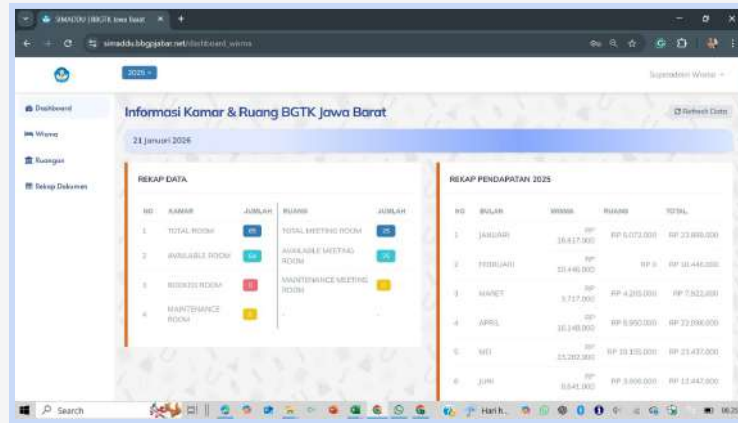


### 2) WISMADDU

WISMADDU merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh BBGTK Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pengelolaan sarana dan prasarana wisma secara lebih efektif dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelola sarana prasarana dalam melakukan pengelolaan data wisma, serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam proses pemesanan dan pemanfaatan fasilitas wisma. Selain itu, WISMADDU mendukung proses pembayaran biaya tarif wisma secara non-tunai, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan layanan. Penerapan sistem ini memberikan dampak positif berupa tertib

administrasi, kemudahan akses layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana di lingkungan BBGTK Provinsi Jawa Barat.

Penerapan sistem WISMADDU memberikan dampak positif berupa meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan wisma, tertibnya administrasi sarana prasarana, serta kemudahan akses layanan bagi pengguna. Sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan pembayaran non-tunai, serta meminimalkan kesalahan pencatatan dan proses manual. Selain itu, WISMADDU berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pengguna sarana prasarana BBGTK Provinsi Jawa Barat.

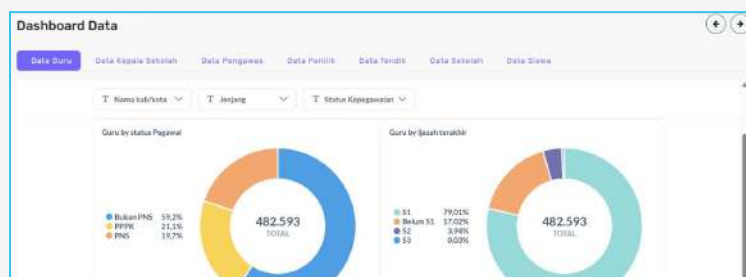


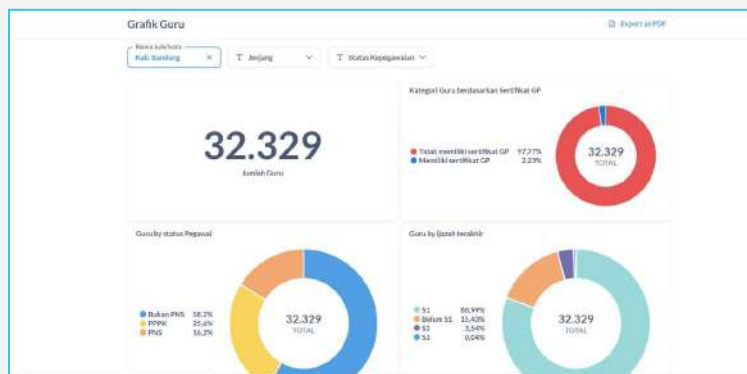
### 3) Sistem Dashboard Data

Sistem Dashboard Data BBGTK Jawa Barat merupakan sistem informasi berbasis dashboard yang dikembangkan dan dikelola untuk menyajikan data pendidikan di wilayah Jawa Barat, meliputi data guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, tenaga kependidikan (tendik), sekolah, dan siswa sebagai bahan informasi, pemantauan, dan analisis.

Dashboard ini dirancang dengan konsep keterbukaan informasi publik, di mana pengguna umum dapat mengakses data dalam bentuk rekapitulasi jumlah dan visualisasi data yang disajikan dalam grafik dan tabel. Penyajian data publik difokuskan pada informasi agregat tanpa menampilkan data individu guna menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Selain itu, sistem menyediakan akses khusus bagi administrator, yang memungkinkan pengelolaan dan penelusuran data secara rinci by name untuk keperluan analisis internal, validasi data, dan penyusunan laporan.





#### 4) Diklat Microcredential Guru Calakan

Merupakan inovasi peningkatan kompetensi guru berbasis digital yang dirancang fleksibel, modular, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembelajaran di era digital. Program Microcredential dikembangkan dengan tujuan menyusun desain, model, dan alur pelatihan agar adaptif terhadap dinamika kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Program Microcredential meningkatkan akses guru terhadap pelatihan yang fleksibel dan berkelanjutan, mendorong peningkatan kompetensi digital secara spesifik dan terukur, serta memperkuat budaya belajar mandiri melalui pengakuan kompetensi berbasis digital badges yang mendukung daya saing guru di masa depan.

**Guru Calakan**  
(Cerdas, Kolaboratif, Kreatif, Majukan Pendidikan)

Salah satu terobosan inovatif dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Barat untuk menghadirkan lagannya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui platform pembelajaran Guru Calakan, guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya dapat memilih untuk belajar apa saja, di mana saja, dan kapan saja tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya.

**BBGK Jawa Barat**  
Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat hadir bergerak untuk menggerakkan. Kami mulai berkiprah sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022. BBGK Jawa Barat bergerak bersama untuk Jabar JUMARA (Ajar, Unggul, Adaptif, Ramah, dan Amanah).

**SIMADDU**  
Simaddu adalah sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengelola informasi terkait keaktifan, kehadiran, dan prestasi kerja. BBGK Jawa Barat.

[Lihat Daftar Diklat](#)

**Dashboard**

**Published Courses (2)**

- 2025 Diklat PKG Sukses Inag...
- 2025 Pelatihan Pendidikan H...

**Unpublished Courses (0)**  
No courses to display

**To Do**

- Guru Unggah (4/3)

**Coming Up**  
Waiting for the next week

[View Grades](#)

BBGK Jabar

#### 4. Penghargaan

Pada tahun 2025 BBGTK Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan:

##### 1. ZI WBK (Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi)

Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Capaian ini merupakan wujud komitmen BBGTK Jawa Barat dalam menjalankan birokrasi yang bersih, transparan dan melayani



##### 2. PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah





3. Arsiparis berprestasi tahun 2025 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



4. Penghargaan Kolaborasi dalam Seminar Kebahasaan dari FKIP Universitas Islam Nusantara dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat



5. Piagam Penghargaan : Dukungan terhadap peningkatan kompetensi GTK serta program prioritas Kemendikdasmen



6. TOP Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2025 berdasarkan Efisiensi Anggaran KEMENPAN-RB.


**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**  
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 12, JAKARTA 12182  
TELEPON (021) 750031 - 750032, FAKS/ALAM (021) 750022, SITUS [www.kempan.go.id](http://www.kempan.go.id)

**PENGUMUMAN  
NOMOR: SI/27/PP/00.05/2025  
TENTANG  
FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BUMN DAN BUMD  
TAHUN 2025 BERDASARKAN EFISIENSI ANGGARAN**

Sesuai dengan Berita Acara Nomor: SI/217/PP.00.05 tanggal 14 Juli 2025, perihal Berita Acara Seleksi Tertutup Hasil Tahap Penilaian Proposal KIPP Tahun 2025, Tim Sekretariat KIPP 2025 mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

- Tim Evaluasi (TE) telah melakukan sidang pleno pada tanggal 14 Juli 2025 untuk menentukan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian proposal yang telah dilakukan oleh TE sejak tanggal 30 Juni sampai dengan 13 Juli 2025.
- Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 diumumkan berdasarkan hasil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
- Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik diminta untuk menyiapkan video inovasi yang akan digunakan untuk penilaian oleh masyarakat sebagaimana ketentuan pada Langkah II.
- Selama 3 (tiga) hari kalender, terhitung mulai hari ini sampai dengan tanggal 23 Juli 2025 pukul 12.00 WIB, akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan opini keberatan terhadap Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025. Masyarakat yang menyampaikan opini keberatan wajib menyertakan bukti relevan yang akan menjadi pertimbangan bagi TE dalam pengambilan keputusan.
- Jika tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 4, selanjutnya akan dilakukan penetapan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri PANRB.
- Inovasi yang ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025, akan melewati tahap penilaian dari Tim Panel Independen (TPI) dan Penilaian oleh Masyarakat mulai tanggal 28-30 Juli 2025.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 21 Juli 2025  
 Deputi Bidang Pelayanan Publik  
 Ketua Tim Sekretariat KIPP Tahun 2025  
  
 Agus Kuswardana

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
3	Sehatlah Sakai dan Korban (SSK)	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Kementerian/Lembaga
4	Open the Gate	Pemerintah Daerah Kabupaten Yogyakarta	Dimas Sosial	Provinsi
5	Maju Berani untuk Anak Disabilitas (MUSKALIFAS): Solusi Pelayanan Kesehatan Anak Disabilitas yang Lebih Cepat dan Mudah (Langkah: SIBATK (Sistem Informasi Bullying Terpadu) dan Informatik)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Puskesmas Ciasemak	Provinsi
6	Terlayani dan Informatik	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	SMA N 1 Nunukan Selatan	Provinsi
7	Paradigme Terpadu	Pemerintah Kabupaten Bantul	OPJALPPKB	Kabupaten/Kota
8	SERVING THE VILLAGER	Pemerintah Kabupaten Bantul	Diras Kependudukan dan Desa/Desa Diklat	Kabupaten/Kota
9	Pisik Atanda	Pemerintah Kota Maduri	Diras Sosial, Perencanaan, Perumahan dan Pertanahan Anak	Kabupaten/Kota

**G. Penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja**

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	Digitalisasi Mutiara	Kementerian Komunikasi dan Digital	Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital	Kementerian/Lembaga
2	Karasa Sosial (Kendaraan Rekreasi Ekohack, Sarana Kelangkaan SDGP-Jabar)	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Batas Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat	Kementerian/Lembaga

## 7. Akreditasi Perpustakaan

Perpustakaan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 telah berhasil memperoleh Akreditasi Perpustakaan Khusus dengan Nilai A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Capaian ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi Perpustakaan BBGTK Jawa Barat dalam menyelenggarakan layanan perpustakaan yang bermutu, profesional, dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

**BERITA ACARA HASIL VISITASI PERPUSTAKAAN**

Berdasarkan hasil visitasi perpustakaan yang dilakukan tim asesor terhadap perpustakaan:

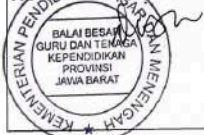
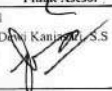
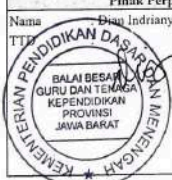

Nama Perpustakaan : BBGTK (Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidik) Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jl. Diponegoro No.12, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat  
Waktu Penilaian : 17 Desember 2025

Diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Koleksi	15	14,79
2	Sarana dan Prasarana	10	9,86
3	Pelayanan	20	19,64
4	Tenaga	15	12,60
5	Penyelenggaraan	10	8,86
6	Pengelolaan	15	12,60
7	Inovasi dan Kreativitas	5	4,40
8	Tingkat Kegemaran Membaca	5	4,00
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5	4,50
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>91,24</b>

Merujuk hasil visitasi perpustakaan, maka kami dari pihak perpustakaan yang diakreditasi menyatakan **PERSETUJUAN** terhadap hasil visitasi perpustakaan tersebut untuk dijadikan bahan penentuan penilaian akreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi terhadap perpustakaan kami.

Pihak Penandatanganan Berita Acara:

Pihak Perpustakaan	Pihak Asesor
Nama : Dian Indriany, M.Si. TTD : 	Asesor ke-1 Nama : Dani Kariyanto, S.S TTD : 
	Asesor ke-2 Nama : Nori Safitri, S.Pd.Ing. TTD : 

## 5. Program *Crosscutting/Collaborative*

Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat mutu guru dan tenaga kependidikan. Kemitraan ini diwujudkan melalui kerja sama yang saling melengkapi, pihak-pihak yang telah bermitra dengan BBGTK Jawa Barat adalah; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 27 Dinas Pendidikan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Universitas Baturaja Sumatera Selatan, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, DJPPR Kemenkeu, Assemblr Edu, K3S SD Swasta Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Muhammadiyah Kab. Sumedang, Kombel Bekasi Selatan, Kombel Eksis, Pegiat Keluarga Indonesia, Seaqil, Seaqis, Direktorat Guru dan Pendidikan Dasar, Direktorat Paud PNF, Setditjen GTKPG, Kementerian Sosial, dan Kelurahan Citarum

Dalam pelaksanaan program kolaboratif, satuan kerja (satker) berperan penting sebagai fasilitator utama. Bentuk kontribusi satker antara lain berupa pembebasan PNBPN untuk peminjaman sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, aula, wisma, serta dukungan konsumsi bagi peserta kegiatan. Selain itu, satker juga menyediakan fasilitasi teknis, meliputi hosting *virtual meeting* untuk mendukung kegiatan daring, serta penerbitan sertifikat sebagai pengakuan resmi atas partisipasi dan pencapaian peserta.

Sementara itu, pihak-pihak mitra turut berperan dalam mendukung keberlangsungan program melalui aspek pembiayaan. Kontribusi mitra mencakup pembiayaan honorarium narasumber, dukungan transportasi, serta akomodasi bagi narasumber dan peserta. Sinergi ini memastikan bahwa program kolaboratif dapat berjalan dengan baik, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan

Dampak dari kolaborasi dengan BBGTK Provinsi Jawa Barat

1. Terjadi pemerataan akses pelatihan di seluruh wilayah Jawa Barat, sehingga guru dari berbagai jenjang memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi.
2. Kolaborasi lintas provinsi memperluas jangkauan BBGTK, memperkuat solidaritas antar daerah, serta memperkenalkan praktik baik Jawa Barat ke wilayah lain.
3. Mendorong pemanfaatan teknologi platform digital dalam pembelajaran, sehingga guru lebih adaptif terhadap inovasi.
4. Memperkuat ekosistem komunitas belajar berbasis digital, mempercepat penyebaran praktik baik antar guru.
5. Efisiensi Pembiayaan
6. Peningkatan jumlah sasaran program peningkatan kompetensi
7. Perluasan jejaring dengan pemangku kepentingan
8. Dengan pembebasan PNBPN untuk peminjaman ruang, aula, wisma, konsumsi, serta hosting *virtual meeting* dan sertifikat, pelaksanaan program menjadi lebih efisien dan inklusif.

Dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama



# BAB IV

## PENUTUP



# BAB IV

## Penutup

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas BBGTK Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Melalui evaluasi ini, BBGTK Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memperkuat langkah peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Selama tahun 2025, BBGTK Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Gambar 11. Ringkasan Kinerja

## Ringkasan Kinerja

Sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BBGTK Jawa Barat tahun 2025, secara umum target yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai, dengan rangkuman sebagai berikut:

### Capaian Kinerja 2025

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBGTK Jawa Barat telah menetapkan 2 Sasaran dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan. Rata-rata capaian dari 3 indikator tersebut adalah 114,54 %, dimana semua indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan

Ketercapaian tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131,034,816,000 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp 103.203.369.731 atau sebesar 78,76 %

Namun dari alokasi tersebut masih ada alokasi blokir sebesar Rp. 26,232,395,000 yang tidak bisa direvisi buka blokir dan tidak dapat diperhitungkan sebagai realisasi.

**Capaian > 100% = 3 IKK**

## Capaian Anggaran Tahun 2025



Gambar 12. Capaian Anggaran Tahun 2025

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Penguatan kemitraan untuk mendukung ketercapaian kinerja melalui program inovasi yang tidak terfasilitasi oleh APBN
2. Perencanaan program dan anggaran yang lebih cermat dan penguatan koordinasi antar unit kerja.
3. Penguatan kapasitas pegawai dalam memahami proses bisnis
4. Keterlibatan seluruh tim dalam mendukung capaian kinerja anggaran, perencanaan dan pelaksanaan SAKIP
5. Perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

Langkah ke depan dalam Peningkatan Kinerja tahun berikutnya

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, BBGTK Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Upaya peningkatan tersebut difokuskan pada penguatan perencanaan, optimalisasi proses bisnis, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan dukungan lintas fungsi dalam pencapaian sasaran strategis. Upaya ini

menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong peningkatan kualitas layanan pada tahun mendatang

2. Menyusun strategi yang tepat pada pelaksanaan program kegiatan (regulasi, linimasa/jadwal, rencana penarikan dana);
3. Penguatan komitmen dan budaya kinerja agar setiap pegawai memahami pentingnya pemenuhan dokumen lembaga dan Nilai Kinerja Organisasi;
4. Meningkatkan dan menjaga konsistensi capaian NKA (Nilai Kinerja Anggaran) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
5. Meningkatkan layanan dan pemantauan pelaksanaan ZI - WBK.

# Lampiran

## 1. Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat  
Dengan  
Direktur Jenderal Guru, Tenaga  
Kependidikan, dan Pendidikan Guru**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Mohamad Hartono, S.H., M.Ed  
Jabatan : Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd  
Jabatan : Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bandung, 30 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Guru, Tenaga  
Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa  
Barat  
Mohamad Hartono, S.H., M.Ed




Catatan:

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE




Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1,31
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp171.486.562.000
2	7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp47.578.282.000
<b>Total Anggaran</b>			<b>Rp219.064.844.000</b>


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Direktur Jenderal Guru, Tenaga  
 Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
 Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Bandung, 30 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa  
 Barat  
 Mohamad Hartono, S.H., M.Ed



Catatan :  
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E



## 2. Perjanjian Kinerja Revisi



**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025**  
**Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Dr. Sugito Adiwersito, S.Pd., M.Pd.Or.  
Jabatan : Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd  
Jabatan : Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bandung, 11 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Guru, Tenaga  
Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa  
Barat  
Dr. Sugito Adiwersito, S.Pd., M.Pd.Or.




Catatan :  
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE




Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1,31
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp88.414.022.000
2	7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp42.620.794.000
<b>Total Anggaran</b>			<b>Rp131.034.816.000</b>


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Direktur Jenderal Guru, Tenaga  
 Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
 Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Bandung, 11 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa  
 Barat  
 Dr. Sugito Adiwarnito, S.Pd., M.Pd.Or.



Catatan :  
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



### 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

## Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan									
Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	0,03	0,09	0,77	1,31	0,03	0,16	1,04	1,59
Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat									
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Predikat	-	-	-	Sangat Baik	-	-	-	Sangat Baik
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	Predikat	-	-	-	A	-	-	-	AA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)  
BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Bandung, 30 Januari 2026  
Ketua Tim Reviu,

Rehmat, ST, MA  
NIP. 198006102006041002

*Check list* Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan  
Provinsi Jawa Barat

No	Pernyataan	Check List/Ket.	Penjelasan	
I	Format	1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	✓	Sudah sesuai dengan pernyataan
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓	
		4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	
II	Mekanisme penyusunan	1. Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	✓	Sudah sesuai dengan pernyataan
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	✓	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	✓	
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	✓	
		5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	✓	
		6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	
		7. Laporan Kinerja bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya		
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan		

No	Pernyataan	Check List/Ket.	Penjelasan
	tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	
2.	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓	
3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
4.	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	✓	
5.	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	✓	Sudah sesuai dengan pernyataan
6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;	✓	
9.	Telah terdapat perbandingan data kinerja	✓	
10.	Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
11.	Indikator kinerja utama dan Indikator kinerja telah SMART	✓	



Bandung, 30 Januari 2026  
Ketua Tim Reviu,

Rohmat, ST, MA  
NIP.198006102006041002